

OPTIMALISASI PERAN KOMANDO KEWILAYAHAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI DARAT (Studi di Kodim 0502/ JU. Kodam Jaya)

Anak Agung Gde Suardhana*) dan Armaidly Armawi**)

Bencana alam di suatu daerah memiliki hubungan sebab dan akibat dengan daerah lainnya, seperti di daerah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, memiliki hubungan bencana alam banjir dan tanah longsor. Penyebab utama karena sebagian besar air yang mengalir dari beberapa sungai di ketinggian wilayah Puncak Bogor, ada yang bermuara ke dataran rendah Jakarta menuju pantai utara. Air mengalir melalui kali di kota dan anak sungai Ciliwung serta ada yang dapat ditampung di beberapa Situ untuk diresapkan airnya, tetapi karena daya serap dan daya tampung Situ dan sungai sangat terbatas, maka akhirnya air luber serta menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Seperti kasus tanah longsor di wilayah Situ Gintung yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2009 dengan memakan korban jiwa dan harta benda. Setelah kejadian bencana di daerah Situ Gintung, banyak tempat penyerapan air berupa bendungan, situ, dan daerah serapan air yang ada di wilayah Jakarta, terutama di Jakarta Utara dilakukan pemeriksaan oleh aparat Pemda terkait. Dari hasil pemeriksaan diperoleh data, bahwa ada beberapa situ atau daerah resapan yang kurang berfungsi lagi dan bila dibiarkan sampai menjelang musim hujan tiba, maka akan menimbulkan bencana banjir. Banjir seperti yang telah terjadi pada tahun 2008 dan bencana akan lebih besar dapat menimpa wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga akan mengganggu situasi dan kondisi keamanan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

***) Dosen Fakultas Filsafat UGM.

Bencana yang sering melanda wilayah Jakarta adalah bencana banjir dan hampir setiap tahun akan ada, terutama pada bulan Desember dan Januari. Bencana tersebut terjadi sebagai akibat dari kurang tertatanya tata ruang, sistem *drainase* yang masih kacau dan lemahnya penanganan penanggulangan banjir oleh pemerintah dan masyarakat. Penataan tata ruang mulai dari hunian masyarakat di sepanjang bantaran sungai Ciliwung, pembuangan sampah, pengendalian air dari Bogor dan Puncak yang kurang, selokan banyak tersumbat sampah/tanah, serta terbatasnya serapan air hujan yang dapat masuk ke tanah akibat lahan serapan terbatas pada lahan di kota. Dampak dari bencana alam dan ulah manusia tersebut banyak menimbulkan kerugian harta benda masyarakat, serta sarana dan prasarana pemerintah yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di ibukota. Terganggunya aktifitas Pemda DKI dan wilayah Jakarta sekitarnya, tentunya mempengaruhi situasi dan kondisi nasional, karena sebagian besar pusat perkantoran pemerintah dan negara asing di Jakarta.

Satuan TNI Garnisun Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta, harus memiliki tanggungjawab bersama untuk melakukan pemulihan keadaan, perlu tanggap

segera untuk menyikapi dengan cepat dan secara simultan menanggulangi dampak dari bencana tersebut. Tindakan segera guna memberikan bantuan kepada korban, melakukan tindakan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, sehingga situasi dan kondisi daerah yang terkena bencana segera dapat berfungsi normal, masyarakat dapat beraktifitas kembali. Jakarta Utara merupakan bagian dari wilayah DKI Jakarta, dan Kodim 0502/JU sebagai satuan kewilayahan, bagian dari organisasi BPBD kota, memiliki tugas dan tanggungjawab bersama dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam di wilayah Jakarta Utara. Dalam menanggulangi bencana. Tugas Kowil adalah membantu Pemkot mengatasi akibat bencana. Tugas Kowil adalah membantu Pemkot mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra stuktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Dengan tugas menjaga keselamatan bangsa dan memulihkan kondisi keamanan daerah dan wilayah nasional tersebut, maka menempatkan satuan jajaran TNI pada posisi yang sangat penting sebagai alat negara, untuk segera dapat memberikan tugas bantuan kepada pemerintah dan masyarakat pada daerah bencana. Dalam kondisi tanggap daru-

rat, Kowil bertanggungjawab dengan cepat, karena memiliki komando kendali sampai ke tingkat desa, memiliki garis komando yang tegak lurus dan jejaring pengendalian dari satuan tingkat atas sampai ke satuan paling bawah, maka Satuan Kowil dapat dengan cepat bergerak untuk memberikan bantuan pada kesempatan pertama. Satuan Kowil dapat dengan cepat bergerak untuk memberikan bantuan pada kesempatan pertama.

Satuan Kowil yang tersebar di seluruh wilayah Jakut, telah memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan, meliputi pembinaan demografi, geografi dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat pula memberikan bantuan pada tahap tanggap darurat, tetapi dapat pula memberikan bantuan pada tahap pra bencana dan pasca bencana alam.

Postur dan Peran Kodim 0502/JU

Postur Kodim

Kodim 0502/JU sebagai Sub Garnisun 02 Jakarta Utara merupakan satuan komando wilayahan (Satkowil) yang berada dibawah jajaran Korem 052/Wijaya Krama, Kodam Jaya dan berada di wilayah teritorial Pemkot Jakarta Utara. Struktur organisasi Kodim terdiri dari Ma-

kodim, serta membawahi 6 Koramil yaitu; Koramil 01/Koja, Koramil 02/Penjaringan, Koramil 03/Tanjung Priuk, Koramil 04/Kepulauan Seribu, Koramil 05/Cilincing dan Koramil 06/Kelapa Gading. Jumlah personil nyata 227 orang terdiri dari; 16 Perwira, 145 Bintara, 42 Tamtama dan 52 PNS. Koramil yang membina wilayah 2 kecamatan yaitu; Koramil 02/Penjaringan (Kec. Penjaringan dan Kec. Pademangan), Koramil 04/Kep. Seribu (Kec. Kep. Seribu Utara dan Selatan).

Peran Kowil dihadapkan pada pertimbangan tugas

Dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana alam adalah akan terganggunya sendi-sendi kehidupan masyarakat pada aktifitas perekonomian, kesehatan, psikologi dan ketertiban masyarakat, maka akhirnya dapat pula mengganggu stabilitas pemerintah kota Jakarta Utara. Bila bencana tersebut menimbulkan korban jiwa manusia, harta benda yang cukup besar, dan sarana prasarana di beberapa desa, maka akan menjadi tidak berfungsinya pemerintah kota. Guna menanggulangnya maka diperlukan peran kesiapan dari organisasi BNPB/BPBD dan satuan-satuan TNI di Garnisun Jakarta yang telah diorganisir pada Satgas PRC PB

sesuai dengan tingkatan bencana, dengan cepat untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan tataran kewenangannya dalam Protap. Satgas Garnisun diorganisir perannya mulai tingkat Kodam Jaya sampai dengan tingkat Komando Rayon Militer (Koramil).

Satgas PRC PB juga merupakan bagian dari kekuatan PRC PB TNI berada dibawah kendali langsung Panglima TNI, dan setiap saat dapat digerakan diperbantukan ke Kowil. Kodam Jaya selaku Komando Utama Operasi (Kotamaops) juga berperan sesuai dengan tataran kewenangannya menyiapkan satu Satgas PRC PB yang langsung dapat dikendalikan dibawah komando operasi Pangdam/Danrem/Dandim. Dapat dioperasionalkan pada bencana tingkat daerah dan atau dapat dioperasikan oleh Panglima TNI di daerah bencana lain, untuk memperkuat PRC PB TNI, bila ada permintaan bantuan dari Pemda, bila kondisi bencana dikategorikan nasional.

Untuk kekuatan satuan Kopassus sebagai satuan khusus TNI AD di Jakarta, mempunyai tugas untuk menyiapkan personel yang mempunyai kemampuan sesuai dengan macam bencana yang terjadi, dalam bentuk Satuan Unit Khusus. Berperan dapat memberikan bantuan

perkuatan pada satuan PRC PB Kodim di daerah bencana alam, dengan peran yang khusus dimana tugas tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan tidak dapat dikerjakan oleh personil yang ada di Kowil. Sedangkan satuan Kostrad sebagai satuan cadangan yang strategis di TNI AD di Jakarta, menyapkan satu Batalyon PRC PB sepanjang tahun bersiaga, dengan mengatur pembagian tugas secara bergiliran antara Divisi Infantri-1 dan Divisi Infantri-2/Kostrad. Satuan siaga berperan memberikan bantuan khusus pada satuan-satuan di Satgas Kowil dari usulan Kasad, dan atas nama Panglima TNI. Kekuatan satuan Kostrad dan Kopassus disiapkan dengan status atas perintah, atas permintaan Kodam yang mengalami bencana. Sedangkan Eselon Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) yang ada di Kodam Jaya mempunyai peran penyiapan pembinaan kemampuan satuan, serta alat utama masing-masing sesuai fungsi kecabangannya.

Peran Kowil dihadapkan pada pertimbangan kondisi alam

Kondisi wilayah geografi Indonesia sangat luas dan rawan terhadap bencana alam, di samping itu tempat kejadian, waktu terjadinya, jenis dan tingkat bahayanya bencana sangat sulit untuk diprediksi. Situasi tersebut

sangat sulit untuk diketahui dan diperkirakan kemungkinannya, karena masyarakat belum memahami gelagat terjadinya bencana, dan kondisi daerah-daerah rawan bencana sebagian besar belum dilengkapi alat peralatan pendeteksi dini tentang gejala-gejala bencana.

Wilayah Jakarta kondisinya sebagian besar berada di bekas rawa-rawa dengan hunian yang sangat padat serta gedung-gedung bertingkat, dilalui oleh 13 aliran anak sungai Ciiwung bermuara ke laut Jawa, serta banjir kiriman dari wilayah Bogor, menjadi penyebab bencana. Masyarakat Jakarta kurang disiplin dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, membuat hunian di sepanjang kali dan menghambat jalannya air di selokan-selokan. Dari pertimbangan terhadap alam yang ada, maka diperlukan peran dalam pengorganisasian tugas dan pemberian bantuan kemanusiaan dan SAR. Peran yang disiapkan adalah untuk mendukung kemampuan dan kekuatan dalam tugas penyelamatan di sungai, situ, pantai dan gedung-gedung. Maka pendidikan dan pelatihannya pun disesuaikan dengan perannya nanti secara individu maupun dalam bentuk tim/kelompok. Contohnya keterampilan renang, penyeberangan sungai, panjat gedung,

penyelamatan di air, penyelamatan dari runtuh bangunan/gedung, demikian juga peralatan yang harus disiapkan untuk perorangan/satuan. Bila bencana seperti yang terjadi di Padang yaitu korban tertimbun bangunan, maka kemampuan dan keterampilan yang disiapkan adalah kemampuan evakuasi darat, anjing pelacak, kemampuan dari satuan zeni untuk membongkar timbunan bebatuan dan tanah.

Sedangkan bila korban luka dan pengungsi yang banyak, maka diperlukan kesiapan dari unsur Bekang berperan melayani dapur dan angkutan, serta dari kesehatan lapangan dan penyiapan rumah sakit lapangan. Jadi satuan Kowil dalam tindakan tanggap darurat mampu berperan memberikan tindakan penanggulangan pertama, harus dapat memerankan tugas fungsi departemen lain yang bersifat sementara, karena personilnya belum mampu masuk ke daerah terpencil dan medan yang sangat sulit. Kemampuan yang diperankan harus dilatihkan pada awal Progja satuan, dan perannya disesuaikan dengan kepentingan tugas, dan bila dalam bentuk tim/satuan maka diprogramkan dengan Pemerintah kota Jakut.

Pembinaan dilaksanakan secara dini dan jauh hari secara terpadu adalah dalam rangka

mengurangi dampak dari bencana alam, yaitu dengan melakukan Pembinaan Teritorial (Binter), dengan metoda Bhakti TNI secara terus menerus sesuai program Kowil dan rencana pembangunan dari Pemda. Kemudian melakukan Komunikasi Sosial (Komsos), membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang bencana kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih memahami dan melakukan pencegahan awal terjadinya resiko bencana, dengan program terpadu pada mitigasi fisik dan non fisik. Sedangkan untuk memberikan ketahanan sikap mental, jiwa juang dan saling membantu, maka diperlukan pembinaan perlawanan wilayah/pertahanan wilayah, dengan materi agar masyarakat dapat berperan sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan melakukan tugas keamanan daerah bencana alam.

Ketiga peran pembinaan tersebut dilaksanakan secara bersamaan memadukan program kerja dari Kodam Jaya/Kodim 0502/JU dengan Pemprov DKI Jaya/Kota Jakarta Utara. Untuk dapat mengorganisir satuan sesuai dengan kemampuan, alat yang digunakan, serta jumlah personil yang dilibatkan, maka diperlukan pemahaman tentang macam, lokasi dan dampak yang akan ditimbulkan di daerah bencana alam.

Macam, Dampak, dan Kriteria Bencana

Macam bencana alam

Diperoleh informasi bahwa bencana yang sering terjadi di wilayah Jakarta Utara adalah banjir, kebakaran perumahan, air laut pasang (*rob*). Penyebab banjir masih dominan karena ulah masyarakat yang kurang disiplin membuang sampah, melanggar kelestarian alam dan lingkungan hidup, diantaranya akibat gundulnya hutan dan pegunungan di hulu sungai wilayah Bogor, kemudian mengirim banjir ke Jakarta. Serapan air di daerah ketinggian tidak berfungsi akibat banyaknya pertanian yang tidak menggunakan pola terasering, kurang memperhatikan serapan air, seperti di penataan bangunan yang terjadi Puncak Bogor.

Dampak dari bencana alam pada masyarakat antara lain berupa korban jiwa, hilang, luka, wabah penyakit dan terisolasi dari lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat pada waktu yang berkelanjutan dapat menimbulkan dampak psikologis (*trauma*). Bila terjadi diperkotaan dapat berupa kerusakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat atau hilangnya arsip/dokumen, tidak berjalannya pelayanan masyarakat, serta tidak berfungsinya pemerintahan, pada perekonomian

berupa hilangnya mata pencarian masyarakat, terputusnya sarana transportasi ekonomi dan sentra-sentra perdagangan, serta hilangnya harta benda, kerusakan rumah, perkantoran, tempat ibadah, sarana transportasi darat, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum.

Kriteria bencana alam dikatakan pada skala provinsi, bila bencana tersebut tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah Pemprov DKI Jakarta. Infrastruktur yang ada hanya sebagian kecil yang tidak berperan dan berfungsi, masyarakat masih dapat beraktivitas dengan terbatas. Korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur Satgas pada BPBD tingkat kota Jakarta Utara. Unsur-unsur Satgas BPBD di tingkat provinsi DKI Jakarta masih mampu berperan mengatasi korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul. Hasil data korban dan kerusakan daerah masih mampu ditangani oleh provinsi, tanpa peran yang besar dari BNPB, maka penetapan tentang status darurat bencana alam untuk skala bencana tingkat provinsi dapat ditetapkan oleh Gubernur DKI Jaya.

Kriteria bencana alam dikatakan pada skala kota, bila bencana yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme

sistem pemerintahan di kawasan kota Jakarta Utara. Infrastruktur yang ada semua masih dapat berperan dan berfungsi serta bisa dijalankan. Unsur Satgas pada BPBD tingkat kota Jakut masih mampu mengatasi terjadinya korban manusia maupun kerusakan daerahnya, maka penetapan tentang status darurat bencana alam dapat ditetapkan oleh Walikota Jakut.

Tataran Kewenangan dan Mekanisme Pelibatan

Dandim 0502/Jakarta Utara, sebagai Komandan Sub Garnisun 02 Jakarta Utara dan sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) PRC PB mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan satuan TNI di garnisunnya dan satuan Bawah Perintah (BP) atau Bawah Kendali Operasi (BKO), untuk melaksanakan penanggulangan, evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan terutama pada tindakan tanggap darurat bencana alam. Memberikan bantuan kepada Pemda kota Jakut dalam proses mitigasi wilayah rawan bencana di daerahnya untuk dapat diprogramkan melalui Bhakti TNI.

Walikota Jakarta Utara, sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui kewenangan

penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah kota. Menetapkan status dan tingkatan bencana, serta membuat rencana pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Bila bencana yang terjadi dikategorikan tingkat daerah, dimana bencana alam tersebut mampu dilaksanakan oleh Pemprov. DKI/Kota Jakut, maka Gubernur/Walikota secara lisan menyampaikan permohonan permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Dandim 0502, sesuai dengan strata jabatan dan tataran kewenangannya di daerah yang terkena bencana, setelah itu diikuti permohonan permintaan secara tertulis.

Hambatan Kuantitas dan Kualitas Personil

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kowil sebagai satuan kewilayahan mendapatkan prioritas urutan ke-3 dalam hal pemenuhan pesonil, setelah pertama memenuhi kebutuhan Satpur yang banyak bertugas langsung di lapangan, Satbanpur, dan prioritas ke-2 untuk Satbanmin. Dengan keterbatasan pemenuhan personil dari komando atas, maka personil yang ada di Kowil semakin berkurang dari waktu ke waktu akibat dari pro-

ses alami yaitu; pensiun, mutasi perubahan pangkat dan jabatan, serta akibat status kesehatannya menurun (Stakes III), dan akhirnya organisasi Kowil yang ada terkesan kurang potensial dalam melaksanakan tugas.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kodim 0502/JU, sebagai satuan kewilayahan memiliki persoalan yang sama dengan Kowil yang lain di Indonesia, sebagian besar jumlah personilnya terpenuhi berkisar 80%. Bila dihadapkan dengan perannya dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam, terutama pada keadaan tanggap darurat, maka Kodim 0502/JU sangat memerlukan personil yang cukup memadai guna memenuhi organisasi tugas. Bila kekuatannya digelarkan di lapangan daerah bencana banjir pada unsur organisasi BPBD Kota Jakut sampai tingkat di desa, maka sulit terpenuhi dengan merata. Kondisi kuantitas personil Kodim 0502/JU yang ada saat ini, bila dihadapkan dengan luas wilayah binaan di Jakut yang terdiri dari 6 Kec. Kota (31 Kelurahan) dan 2 Kec. Kepulauan Seribu (6 Kelurahan) dan dengan tugas yang dibebankan kepada Kowil diperkotaan yang punya kendala sangat kompleks, maka kurang efektif. Pelaksanaan tugas bila terjadi bencana, maka BPBD dibantu oleh orga-

nisasi profesi dan masyarakat sekitarnya, atau sukarelawan (*volunteers*) dari daerah lain. Bila daerah bencana sangat jauh dan terpencil, dan masyarakatnya cukup banyak yang terkena bencana, maka ada kesulitan dalam mengorganisir kekuatan, untuk itu diperlukan Satgas yang mandiri untuk dapat menanggulangnya.

Kondisi komponen cadangan dan komponen pendukung saat ini belum terwujud karena keputusan politik yang belum tuntas. Peran komponen tersebut adalah untuk mendukung dan melengkapi dari keterbatasan yang ada pada Kowil, meliputi pengerahan WNI, SDA, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sebagai komponen cadangan, dimana komponen ini mampu dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar kemampuan dan kekuatan komponen utama. Kondisi obyektif kualitas personil dapat dilihat dari hasil evaluasi setiap kegiatan program tahunan meliputi Uji Terampil Perorangan/Jabatan dan Uji Tingkat Satuan sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga dari hasil evaluasi Geladi Posko I dan Geladi Lapangan untuk tugas dan fungsi organik pada penanggulangan bencana alam yang diprogramkan oleh pemerintah. Kualitas

sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam organisasi, karena bila dalam organisasi manusia dipersenjatai atau Alutsista bila diawaki manusia, dan bila tanpa diikuti dengan kemampuan, maka hasilnya tidak akan efektif.

Organisasi Kapasitas Kodim 0502/JU

Optimalisasi Organisasi Kowil dalam BNPB/BPBD

Dalam rangka mengoptimalkan kapasitas Kowil pada penanggulangan bencana, maka yang perlu ditingkatkan kapasitasnya pertama adalah unsur organisasi Satgas TNI yang menjadi bagian dari BPBN, mulai dari tingkat pusat di PRC PB di tingkat Kodim, Koramil dan Desa. Kapasitasnya ditingkatkan melalui reorganisasi di masing-masing Satgas dengan menjabarkan tugas dari unsur Satgas lebih aplikatif mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pengakhiran tugas.

Kedua adalah posturnya, karena berhubungan dengan kekuatan, kemampuan dan gelarnya di wilayah, terutama pada kondisi tanggap darurat. Keadaan tanggap darurat, di mana kondisi yang sangat sulit pengendaliannya, masyarakat dalam kondisi sangat lemah, panik, tidak dapat mengambil keputusan, setiap orang melaku-

kan penyelamatan, korban jiwa dan harta terjadi Dalam keadaan darurat tersebut maka Kepala BNPB dan Kepala BPBD berwenang untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. Sumber daya manusia yang digerakkan harus dalam kondisi terorganisir mulai dari tingkat desa, sehingga dapat dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna di lapangan.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang otonom tingkat paling bawah dan mampu untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di babarapa Rukun Tetangga (RT), dan telah memiliki perangkat organisasi desa. Untuk itu maka pengorganisasiannya dapat dimulai dari tingkat desa dalam bentuk Satlinmas Penanggulangan Bencana (SPB), dan meningkat di tingkat kecamatan. Dengan terwujudnya Satlinmas PB di desa dan kecamatan maka akan dapat membantu dan memberdayakan organisasi BPBD Pemprov/Pemkot, atau dapat membantu desa lain yang mengalami bencana. Susunan personil Satlinmas di kelurahan, dengan ketuanya Lurah/Kepala Desa, sedangkan Wakil Ketua I dijabat oleh Babinsa dan Wakil Ketua II dijabat oleh Babin Kamtibmas.

Untuk unsur pelaksana di bawahnya terdiri dari sepuluh unsur pelaksana, mulai dari Sekretaris, Tim Deteksi, Poslong, Evakuasi, Dapur, Caraka, SAR, Pionir, Pemadam Kebakaran dan unsur Pengamanan. Pembentukan Satlinmas Desa diprioritaskan pada 26 desa yang memiliki potensi rawan bencana banjir di Jakarta Utara, sesuai data desa rawan yang ada di Kodim 0502/. Sedangkan pada tingkat kecamatan organisasinya sama dengan tingkat desa/kelurahan, tetapi kuantitasnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketuanya adalah Camat dan dibantu oleh Danramil/Pabung serta Kapolsek. Tingkat provinsi organisasinya dipimpin oleh seorang ketua pada pejabat di pemerintahan setingkat di bawah Gubernur DKI atau setingkat Eselon Ib. Pimpinan di kota dipimpin oleh seorang ketua pada pejabat di pemerintahan setingkat di bawah Walikota Jakut atau setingkat Eselon Ila. Dengan tugas menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB pusat, terhadap usaha penanggulangan bencana. Susunan personil di BPBD Pemkot, Dandim sebagai Wakil Ketua I dan Kapolres sebagai Wakil Ketua II.

Organisasi BNPB memiliki peran dalam penanggulangan

bencana, bila bencana berubah status ke tingkat nasional dan menjadi bencana nasional. Organisasi untuk melakukan penanggulangan bencana tingkat nasional telah diatur pada Perpres RI No.8/2008 tentang BNPB.

Optimalisasi Kapasitas Postur Kodim 0502/JU

Dari data responden yang diperoleh di Kodim 0502/JU, bahwa sebagian besar prajurit belum pernah mengikuti pendidikan tentang penanggulangan bencana alam. Bila ada yang menyebutkan dapat memperoleh pengetahuan, itu sebagian besar ada pada golongan Perwira, sedangkan materinya hanya 5 JP, bersifat pengenalan. Kemampuan yang lain diperoleh dari penugasan di satuan, maka diperlukan peningkatan lanjutan kemampuan di satuan. Optimalisasi kemampuan meliputi pembinaan pengetahuan dan keterampilan yang ada pada setiap prajurit maupun satuan. Pembinaan satuan dilaksanakan dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan kinerja yang ada, dan harapannya lebih meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok yang dibebankan.

Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara terprogram dalam bentuk

pendidikan dan latihan pada lembaga formal maupun non formal di instansi satuan masing-masing.

Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara terprogram dalam bentuk pendidikan dan latihan pada lembaga formal maupun non formal di instansi satuan masing-masing. Optimalisasi peran yang diperlukan saat ini sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi adalah pemahaman tentang penggunaan alat-alat penyelamatan jiwa korban.

Kekuatan personil Satgas Kowil Kodim 0502/JU saat ini terdiri dari unsur Kodim 0502/JU, unsur 1 Kompi Polres Metro JU, 1 Kompi Armabar, 2 Kompi Yon Arhanud-6, 1 Kompi Lantamal, 1 Kompi Polres KP3, 2 Kompi Satpol PP JU. Kekuatan tersebut belum cukup untuk melakukan penanggulangan di seluruh wilayah bencana di Jakarta, maka diperlukan peningkatan kekuatan dari unsur satuan Kostrad, Kopasus di wilayah Jakarta, dan perkuatan dari unsur Korem 052/Kodam Jaya, dalam bentuk satuan cadangan di masing-masing satuan sebanyak 1 Kompi PRC PB yang siap diperbantukan dalam keadaan darurat ke Satgas Kodim 0502/JU.

Dalam kondisi damai ancaman militer menjadi kecil ke-

ungkinannya, maka kekuatan yang ada digunakan untuk mengatasi ancaman nir militer yaitu dalam membantu pemerintah di daerah, diantaranya dalam penanggulangan konflik, berbagai bencana alam. Untuk itu maka optimalisasi peran dan peningkatan kuantitas dan gelar tetap satuan personil satuan TNI AD berbentuk Batalyon Tim Teritorial dibawah Korem. Dalam konsep Sishanta untuk menghadapi ancaman militer dan nir militer, maka peran komponen cadangan dan pendukung perlu diberdayakan secara dini oleh pemerintah yang di dalamnya Kodim.

Dalam proses mitigasi bencana alam, maka sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat, karena kalau bertumpu pada pemerintah maka sulit terjangkau keberhasilannya karena luasnya daerah bencana. Untuk membentuk partisipasi masyarakat dan mitigasi bencana, maka Dansatkowil membentuk Satgas khusus terpadu, guna mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan penyiapan inti satuan tugas penanggulangan bencana di sekolah-sekolah, instansi pemerintah dank omponen masyarakat melalui metode kosmos dan Tahwil pada program pemberdayaan melalui Binter Kowil. Sedangkan kekuatan cadangan dapat ditem-

patkan pada suatu daerah tertentu atau tetap berada secara terpusat di masing Kowil se-tingkat Kodam. Efektivitas kekuatan utama dan kekuatan cadangan Satgas PRC PB dapat dioperasikan menuju sasaran bencana alam, sangat dominan ditentukan oleh sarana angkutan yang memadai dari segi jumlah maupun kualitas dan kelayakannya. Sarana angkutan yang efektif dalam penanggulangan bencana banjir di daerah Jakarta adalah berupa perahu-perahu karet kecil, kendaraan truk. Dalam pelaksanaan membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, Satgas PRC PB TNI AD yang berada di semua tingkatan, harus mampu dengan cepat untuk digerakkan disemua sasaran diseluruh wilayah Jakarta Utara. Kecepatan untuk sampai di sasaran dapat berlangsung karena satuan tersebut memiliki sarana angkutan yang cukup, daerah menuju sasaran memadai dan daerah bencana memungkinkan untuk segera dapat didatangi. Tetapi saat ini terjadi pula keterbatasan kuantitas personil yang tergelar, sedangkan daerah dan titik-titik bencana cukup banyak dan luas, tuntutan tugas tetap berjalan, maka diperlukan pengaturan gelar Satgas yang digelar di wilayah yang dominan memerlukan, dan satuan cadangan

yang disiagakan. Dari rumitnya kendala dan permasalahan yang muncul dalam penyiapan satuan PRC PB Kodam Jaya, maka untuk efektivitas dan efisiensi dalam penyiapan satuan untuk operasi justru akan lebih efektif bila setiap Korem dapat menyiapkan satuan PRC PB dan satuan PRC PB Kodam Jaya sebagai cadangan umum sambil menunggu bantuan pasukan cadangan. Daerah yang memungkinkan menerima ancaman muiter dan nir militer dengan tinjauan pada penyiapan Sishanta, sedangkan bila daerah tersebut memiliki tingkat ancaman yang faktual pada nir militer yaitu berupa ancaman bencana alam, maka gelarnya disiapkan apakah dalam bentuk disposisi tetap maupun dalam bentuk penugasan di daerah Bawah Kendali Operasi (BKO) di Koramil, sambil menunggu bantuan pasukan cadangan.

Kostrad dan Kopassus sebagai kompartemen strategis/khusus yang kendali komandonya secara terpusat, dengan gelarnya di beberapa wilayah mempunyai peran yang sangat dominan dalam rangka memberikan bantuan cepat pada Kowil yang mengalami bencana.

Posko merupakan suatu tempat/lokasi yang aman sebagai wahana didalam mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu

kegiatan untuk memudahkan jalannya pelaksanaan tugas, baik bersifat statis di Posko Utama dan yang bersifat mobil di Posko Taktis. Untuk memudahkan komunikasi staf, maka Posko Utama yang berada di Makodim 0502/JU diisi data-data antara lain; peta daerah bencana alam, tempat pengungsian, tempat evakuasi, tempat daerah aman, rute penyelamatan/evakuasi, rute-rute kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah, penempatan dan jenis pasukan yang terlibat, instansi terkait yang terlibat dan sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan pos komando, terutama alat komunikasi. Poskotis pada umumnya bergerak dilapangan berdekatan dengan tempat bencana yang terjadi, pesonil dilengkapi dengan kelengkapan khusus dan seperlunya untuk memudahkan dalam pengendalian langsung dan manover satuan di lapangan. Poslong PB merupakan tempat aman yang sangat penting dan digunakan sebagai tempat pertolongan darurat, dengan perlengkapan medis serta personelyang memadai, dengan peralatan dan personel khusus yang melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan kecelakaan. Poslong PB ini sebaiknya sedekat mungkin dengan sasaran namun terjamin keamanannya sehingga dapat dengan cepat da-

pat menolong korban, seperti tersedianya helipad, tempatnya mudah ditemukan, mudah dilalui kendaraan ringan dan ada daerah lapangan tempat/tenda evakuasi. Sedangkan TD didirikan di daerah yang aman, mudah didatangi oleh masyarakat atau petugas, sedekat mungkin dengan jalur transportasi darat, laut dan udara, sehingga dengan mudah penyalurannya untuk korban dan untuk kepentingan satuan yang tergelar di lapangan. Untuk memberikan kecepatan pelayanan maka TD dapat didirikan di beberapa tempat yang aman secara tersebar.

Optimalisasi Kapasitas Administrasi dan Logistik

Untuk kebutuhan logistik dalam pengerahan satuan tugas TNI dan personel pendukung atau perkuatan lainnya dari satuan, menggunakan anggaran bersama antara pemerintah daerah serta mendorong dukungan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan bila saat tanggap darurat maka BPBD dapat menggunakan dana siap pakai.

Dalam pengerahan pasukan untuk melaksanakan tugas harus dilengkapi secara administrasi dengan surat perintah dari komando atas sesuai dengan jalur komando satuannya. Setelah

penugasan selesai harus dilaksanakan pelaporan paling lambat tujuh hari setelah kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan kepada satuan komando atas masing-masing. Pelibatan Satgas PRC PB diprioritaskan pada tahap tanggap darurat, sedangkan pada pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, apabila pemerintah masih memerlukan bantuan TNI, selanjutnya secara prosedural mengajukan permintaan kepada Panglima TNI/Pangdam Jaya untuk dilaksanakan Operasi Bhakti TNI. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana selama melakukan tugas, maka tetap dikenakan sanksi hukum yang berlaku di militer dan telah diatur dalam peraturan hukum pidana dan disiplin militer, dan diadili dalam peradilan militer. Setiap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dapat dikatakan berhasil bila sesuai dengan prosedur teknik, ketentuan hukum dan tidak melanggar HAM yang dipersyaratkan secara umum. Dalam hal ini Kowil maupun pemerintah daerah telah memiliki beberapa acuan serta aturan dari tingkat pusat berupa undang-undang, maupun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Protap dalam penanggulangan bencana di masing-masing tingkatan. Dalam penanggulangan bencana banjir di

daerah Jakarta Utara misalnya, pada BPBD kota telah memiliki Protap tahun 2009 yaitu *Standing Operating Procedure (SOP)* Penanggulangan Bencana Banjir.

Secara umum TNI/TNI AD harus melakukan penjabaran UU No. 34/2004 tentang TNI pada OMSP pada tugas membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Dalam penjabarannya disesuaikan dengan stratifikasi doktrin Tridek TNI dan Doktrin KEP dalam bentuk buku petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknik dan lapangan. Dengan dijabarkannya tugas bantuan penanggulangan bencana dalam stratifikasi doktrin TNI, maka akan dapat dipergunakan sebagai acuan oleh instansi dibawahnya dalam pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar satuan TNI/TNI AD yang ada di dalam lembaga pendidikan maupun satuan.

Dukungan logistik untuk membantu pengerahan dan pe libatan Kowil dan Satgas PRC PB TNI AD dalam penanggulangan bencana alam skala nasional atau daerah, didukung oleh instansi yang meminta atau dari dukungan dana APBN/APBD dan telah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD, serta disalurkan melalui Mabes TNI/Kodam/Korem/Kodim. Untuk dukungan logistik dan alat peralatan

kebutuhan satuan PRC PB diprogramkan oleh Balakpus sesuai dengan fungsinya untuk kebutuhan pembinaan maupun pelaksanaan tugas dan bantuan logistik juga diperoleh dari Pemkot Jakut dan partisipasi masyarakat.

Optimalisasi Kapasitas Perencanaan dan Koordinasi Kodal

Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana alam, pada satuan jajaran Kodim0502/JU dan atau bergabung dengan satuan TNI/unsur lain, maka diperlukan dukungan komunikasi di masing-masing unsur pelaksana dan dengan pengendalian yang terpusat maupun tersebar sesuai situasi dan kondisi tugas di lapangan, serta adanya kesatuan komando dari semua satuan yang terlibat. Komando dan pengendalian penanggulangan bencana alam di darat dapat dilakukan oleh pejabat TNI dari tingkat Panglima TNI sampai dengan pejabat setingkat Dandim, sesuai dengan tingkatan skala bencana alam pada skala nasional maupun berskala lokal/daerah. Sedangkan Satgas yang berada di Garnisun 02/Jakarta Utara berada dibawah kendali langsung Dandim 0502/JU, di mana Dandim selaku komandan kewilayahan.

Kondisi tahap tanggap darurat sesuai dengan tingkatan bencana, maka peran komando dan pengendaliannya dilimpahkan kepada Pangdam Jaya/danrem 052/Danim 0502, atau ditunjuk oleh Panglima TNI atas perintah Presiden RI dan atau Dankowil di daerah bencana. Sehingga rentang komandonya akan jelas serta tegak lurus dan pengendaliannya lebih efektif, apa lagi Satgas Miiter dan di dalamnya ada kekuatan militer asing. Bila dalam kondisi pada tahan pra bencana alam dan pasca bencana alam, yang masih punya waktu sela/waktu lebih panjang untuk berkoordinasi, maka masih dapat dipimpin oleh Kepala dari institusi sipil. Koops yang bersifat taktis, maka bantuan Satgas TNI kepada Pemda dalam penanggulangan bencana skala nasional berada pada masing-masing Dansatgas. Satgas PRC PB TNI AD pengendaliannya berada dibawah kendali Panglima TNI, sedangkan kendali operasional bantuan Satgas TNI kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam skala nasional tanggung jawab Dansat PRC PB TNI AD. Kendali operasional bantuan Satgas TNI kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam skala daerah tanggung jawab Pangdam. Pelaksanaan latihan Satgas PRC PB TNI AD dilaksanakan secara ter-

padu dengan unsur lain, secara bertahap, bertingkat dan berlanjut serta berkesinambungan sepanjang tahun program satuan dengan memadukan program kerja dari pemerintah Pusat/Daerah. Pelaksanaan latihan puncak Satgas PRC PB TNI AD, dikoordinir oleh Dankodiklat TNI AD untuk tingkat nasional, oleh Danrindam untuk tingkat provinsi/kota. Untuk memudahkan komunikasi antar organisasi yang ada di BPBD, maka diperlukan BPBD kota membentuk Kantor Sekretariat, dan setiap saat operasional untuk memudahkan komunikasi.

Untuk itu maka Kodal terpadu perlu didirikan, merupakan sarana yang dipergunakan oleh unsur pimpinan untuk menentukan sejauh mana pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan, terutama tugas-tugas yang bersifat darurat di lapangan memerlukan pelayanan yang cepat dan efektif. Ada beberapa sarana pengendalian yang diperlukan di lapangan secara fisik tentunya, seperti didirikannya Poskout, Poskout serta beberapa TD, TB dan Poslong. Untuk memudahkan melaksanakan hubungan antara organisasi dan perorangan ke atas, ke bawah dan ke samping sesuai dengan kepentingan dan jalur komandonya, maka setiap pos tersebut digelar pusat komunikasi intern, dalam

pusat komunikasi masing-masing unsur digelar jaring sistem komunikasinya. Posko digelar dilapangan dengan fungsi mengendalikan Satgas untuk menentukan gerakan atau cara bertindak pasukan di lapangan.

Pelaksanaan Optimalisasi Kapasitas Kowil dalam Berbagai Tahapan

Optimalisasi Kapasitas pada Tahap Pra Bencana

Dalam setiap program yang dilaksanakan di Kodim, 0502/JU, sebagai penjabaran dari tugas Progja Korem 052/WK, maka dijabarkan dalam Progja tahunan masing-masing Komamil. Pembuatan Progja menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya, dalam proses perencanaan maka satuan membuat rencana kemungkinan pelibatan satuan dari beberapa perkiraan yang akan terjadi dengan membuat rencana koordinasi dengan BNPB, BPBD dan instansi terkait. Seperti penataan lingkungan hijau di wilayah Jakarta, guna menjaga kebersihan udara, keindahan taman kota, menjaga keseimbangan air tanah dan menghindari erosi tanah dimusim hujan, maka pemerintah DKI menata jalur hijau sesuai dengan Undang-undang tentang Tata Ruang Wilayah No. 26/2007. Terutama dalam rangka memelihara kondisi lingkungan yang nya-

man bagi masyarakat dan untuk menghindari terjadinya erosi tanah di sekitar taman yang sebagian besar ada di 13 pinggir an anak kali Ciiwung, kemudian membuat pendangkalan sungai sehingga memberi peluang potensi banjir ke sepanjang jalan. Dengan memahami tugas Pemprop/Kota Jakut, maka Kodim memadukan programnya sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dalam proses mitigasi. Merencanakan kegiatan masing-masing Staf sesuai dengan fungsi dan tataran kewenangannya, serta merencanakan program dan anggaran yang digunakan pertahun anggaran. Untuk pembinaan personil maka merencanakan peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan merencanakan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di Satgas, instansi pemerintah/non pemerintah dan masyarakat di daerah binaan, dengan materi dan kebutuhan yang terkait di daerah binaan, dengan materi terkait kemungkinan terjadi bencana banjir.

Persiapan dalam pra bencana maka unsur Staf Kodim melaksanakan koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait, serta memberikan arahan kepada unsur-unsur pelaksana di bawahnya tentang tugas dan ancaman bencana yang akan dihadapi.

Untuk rencana tugas maka menyiapkan personel dan materiil yang diperkirakan diperlukan, dan menyiapkan kegiatan operasional satuan yang akan digunakan dalam penanggulangan bencana. Pemenuhan kuantitas personil diprioritaskan kepada Satgas PRC PB, sedangkan personil Kodim diprioritaskan pada personil jabatan Babinsa, dengan gelar minimal satu desa satu pejabat Babinsa, terutama pada 24 desa rawan bencana banjir di Jakut. Menyiapkan dan menghimpun sumber daya dan potensi Satgas dan organisasi lainnya, menyiapkan daerah pengungsian/Posko Kesehatan, dan menyiapkan kemampuan dengan melaksanakan latihan awal bersifat dril dan latihan staf dalam bentuk Geladi Posko I dan II. Pada dasarnya pelaksanaan dalam kegiatan pra bencana adalah kegiatan kesiagaan dan tindakan mitigasi yaitu kegiatan satuan-satuan TNI dibantu oleh instansi terkait dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mengurangi kerugian yang lebih besar akibat dari dampak bencana, yang bersifat fisik dan non fisik.

Menentukan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dan selalu melakukan koordinasi dengan Pemkot dan memadukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah masing-

masing Satkowil dan satuan Non Kowil, melalui Binter, terutama melaksanakan kegiatan Bhakti TNI dan Komsos dan dituangkan dalam Renos. Melaksanakan latihan simulasi BPBD bersama masyarakat yang kemungkinan terkena bencana guna mengevaluasi kemampuan, sistem, Protap dan unsur lain yang dimiliki, organisasi masa simpatisan serta masyarakat. Dalam simulasi maka setiap kelompok diberikan studi kasus, dengan cara memberikan sebuah atau beberapa kasus manajemen untuk memecahkan dan mendiskusikan di kelompok atau tim masing-masing tim dalam Satgas BPBD, guna saling berinteraksi dengan anggota tim yang lain.

Guna pemahaman tentang rencana kegiatan dan pemberdayaan masyarakat, maka Satgas bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat di daerah yang diperkirakan rawan terhadap bencana. Dalam meningkatkan kemampuan satuan, maka mengatur dan mengendalikan rencana pendidikan dan latihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan menyiapkan personel dari kualitas dan kuantitas secara bertahap, bertingkat, berlanjut dan berkesinambungan, melalui pelatihan dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat satuan sesuai

dengan Sisbinlat, Manajemen Latihan, Nikgarlat dan Proglatsi sepanjang tahun program satuan dengan materi penanggulangan bencana alam. Dengan memanfaatkan waktu yang ada, maka menyempurnakan data tentang sumber daya dan potensi yang ada terkait penanggulangan bencana, yaitu menghimpun sumber dan potensi kemampuan yang ada di satuan/daerah kemungkinan terjadi bencana, dari potensi geografi, demografi dan kondisi sosial. Guna mengevaluasi kinerja tim dalam BPBD Kota Jakut dan PRC PB Kodim 0502/JU, serta validitas Protapprotap yang ada, maka pada waktu menjelang musim hujan di bulan September-Oktober, dilaksanakan Uji Siap Penanggulangan (USP) bencana alam banjir, dengan memadukan program dari Pemkot Jakut.

Peningkatan Kapasitas pada Tahap Tanggap Darurat

Dalam kondisi tanggap darurat, maka Dandim 0502/JU selaku Dansatgas PRC PB segera memberlakukan Rencana Operasi menjadi Perintah Operasi dalam tugas membantu penanggulangan bencana alam. Segera merencanakan tindakan perkiaraan cepat tugas yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait tingkat daerah pada kesem-

patan pertama. Untuk mengetahui sejauh mana tugas yang akan dilaksanakan maka segera mengirimkan Tim Aju guna menentukan skala prioritas sasaran dan penentuan rencana mobiasasi dan penggelaran satuan PRC PB. Menentukan lokasi dan disposisi penempatan Posko, Titik Bekal (TB) dan Titik Distribusi (TD), Pos Pertolongan (Poslong PB) satuan-satuan sesuai dengan kepentingan tugas dan faktor keamanan personil dan materiil. Menyusun rencana Pergeseran Pasukan (Serpas) untuk pelaksanaan tugas ke daerah bencana, melalui route jalan darat, mobil udara (helly copter), sesuai prioritas kesiapan alat angkut yang tersedia di titik mutas masing-masing. Mengkoordinir dan merencanakan kegiatan penyaluran bantuan untuk evakuasi dan bantuan kemanusiaan, terutama daerah-daerah yang dapat terjangkau dan yang segera memerlukannya. Merencanakan tindakan yang bersifat antisipatif yang mungkin timbul dari dampak bencana selanjutnya, melalui tindakan rekontruksi sarana dan prasarana atau melakukan destruksi bangunan dan medan yang menghambat/menghambat pelaksanaan tugas di lapangan, sesuai aturan.

Mengorganisir tim-tim sesuai dengan fungsi dan lokasi kejadian serta melaksanakan kegiatan

pergeseran pasukan sesuai dengan skala prioritas penanggulangan bencana. Untuk memperlancar komunikasi maka mengaktifkan Siskom pada jaringan komunikasi intern dan ekstern Satgas, dan dengan instansi terkait, sesuai dengan Protap Perhubungan yang telah di sepakati bersama. Menyiapkan tindakan bantuan penanggulangan bencana alam yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait tingkat pusat maupun daerah. Menyiapkan kegiatan untuk melaksanakan tugas sesuai data dan informasi yang telah terhimpun, terutama tentang keterlibatan badan SAR.

Kegiatan dalam tahap ini adalah melaksanakan aksi penanggulangan dan penyelamatan awal dengan, segera terhadap korban bencana dengan segenap kemampuan Satgas bersama instansi terkait, meliputi pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah serta kemampuan sumber daya alam dan buatan yang ada di wilayah binaan.

Mengendalikan dan mengkoordinir tindakan bantuan serta mengendalikan SAR. Melak-

sanakan koordinasi dan konsolidasi dengan BPBD tingkat provinsi/kota dengan melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, macam kerusakan dan sumber daya yang ada untuk segera dapat dioperasikan. Melakukan dan mengerahkan sumber daya manusia, materiil dan logistik ke lokasi bencana dengan cepat sesuai kebutuhan, guna dapat memberikan bantuan pada kesempatan pertama.

Menentukan titik pasti Poskout dan menyiapkan Poskotis, sesuai tingkatan satuan dengan mengaktifkan semua sistem komunikasi, serta memanfaatkan sarana komunikasi daerah. Menyiapkan Titik Bekal dan Titik Distribusi disesuaikan dengan situasi kondisi daerah bencana, yaitu dengan melaksanakan koordinasi pada instansi terkait. Menentukan dan menyiapkan tempat penampungan, barak sementara, baik untuk evakuasi maupun pengungsian korban, dan memberikan bantuan kesehatan dan psikologis kepada korban bencana secara terpadu. Melaksanakan penghimpunan dan pencatatan data serta informasi di lapangan tentang kondisi nyata dampak bencana, dan mengorganisir kembali personel dan materiil satuan sesuai perkembangan situasi. Melaksanakan pencarian dan pertolongan

terhadap korban bencana dengan berkordinasi pada Unit/SSK SAR di daerah bencana dengan Basarnas dan Dephub. Menyinkronkan atau memusnahkan barang dan atau benda yang dapat membahayakan dan menghambat proses penyelamatan, dengan persetujuan pejabat daerah dan instansi terkait. Melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan untuk penanggulangan, evakuasi dan bantuan kemanusiaan. Melaksanakan rapat koordinasi di Poskout/Poskotis pada malam hari guna mengevaluasi kegiatan yang telah dikerjakan maupun tugas yang akan dilaksanakan pada tugas selanjutnya. Melaksanakan tindakan bersifat antisipatif yang timbul dari dampak terjadinya bencana alam yang mungkin timbul (seperti berjangkitnya wabah penyakit) pada situasi tanggap darurat, melalui evakuasi masyarakat, rehabilitasi daerah bencana secara darurat.

Melakukan koordinasi terus menerus dan membentuk tim jaringan kerja dengan instansi terkait untuk mendata dan melaporkan kegiatan meliputi; informasi bencana, bantuan evakuasi dan bantuan logistik pada kesempatan pertama. Melakukan pemberdayaan potensi masyarakat yang ada untuk tugas bantuan, terutama untuk evakuasi, perawatan, pengung-

sian dan pendistribusian bekal serta kesiapan dapur umum. Memberikan penerangan, informasi, penyuluhan dan motivasi pada masyarakat umum dan masyarakat yang tertimpa bencana alam. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang dilakukan semua unsur pelaksana di lapangan. Melaksanakan Kamtibmas di daerah bencana dengan melibatkan unsur pengamanan terkait dan masyarakat. Menyusun dan mengorganisir kembali personel dan materiil yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, menghimpun data dan informasi tentang kegiatan penanggulangan bencana alam. Mengadakan pengecekan terhadap semua hasil kegiatan bantuan bencana alam dan melaksanakan tindakan yang bersifat antisipatif terhadap kemungkinan bencana lain yang timbul.

Peningkatan Kapasitas pada Tahap Pasca Bencana

Merencanakan koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat atau daerah tentang rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana, merencanakan dalam mengorganisir kembali satuan dan peralatan untuk kebutuhan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi. Merencanakan metode dan materi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

yang timbul, dengan merencanakan prioritas kegiatan rehabilitasi terhadap kerusakan fasilitas umum yang terjadi, merencanakan pemberdayaan wilayah di daerah bencana dalam rangka ketahanan daerah melalui Binter, dan merencanakan pembuatan laporan kegiatan.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tingkat pusat ataupun daerah tentang rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana serta mengorganisir kembali satuan dan peralatan untuk kebutuhan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi. Mempersiapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana yang mungkin akan timbul, dengan mempersiapkan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan fasilitas umum yang terjadi. Mempersiapkan pemukiman sementara masyarakat untuk mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan sesuai rekomendasi Pemprov Jakut.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana pada dasarnya berupa rehabilitasi dan rekonstruksi daerah maupun korban, dapat dilakukan dengan bantuan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi dilaksanakan oleh Satgas PRC PB dengan perkuatan satuan dari Kodam Jaya dan instansi terkait, dalam rangka memulihkan ke-

hidupan sosial masyarakat dan masih bersifat darurat/terbatas, sambil menunggu program selanjutnya, yaitu program jangka panjang pemerintah.

Melaksanakan rehabilitasi baik fisik maupun non fisik dan rekonstruksi sesuai skala prioritas akibat dampak bencana. Bantuan rehabilitasi fisik meliputi; perbaikan lingkungan daerah bencana. Perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan dalam rangka memperlancar aktivitas masyarakat dan untuk menghindari terjadinya penyebaran wabah penyakit akibat bencana, diantaranya meliputi saluran air, jalan dan fasilitas penerangan/listrik dan perbaikan sarana dan prasarana umum. Perbaikan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang tetap berlangsungnya aktivitas masyarakat dan pemerintah, yang meliputi perbaikan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan, serta fasilitas perkantoran.

Pemberian bantuan tempat tinggal dan melakukan pembuatan tenda sementara akibat bencana alam dalam bentuk darurat untuk tempat tinggal sementara pada tahap tanggap darurat, serta pemukiman kembali dengan rumah semi permanen pada tahanan pasca bencana alam. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam

bidang penyiapan dapur umum, pelayanan kesehatan. Pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu tugas kepolisian dengan menyelenggarakan patroli bersama dan menyiapkan Pos Terpadu/Kamling pada daerah rawan Kamtibmas. Bantuan rehabilitasi non fisik meliputi pemulihan psikologis sosial masyarakat, dengan cara membantu pemerintah dan instansi terkait dalam rangka memulihkan kondisi psikologi masyarakat (*depresi*) yang tertimpa bencana, dan rekonsiliasi dan resolusi konflik. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi konflik saat bencana dan pasca bencana, diantaranya masalah tanah, pembagian hak waris/ penyelesaian administrasi pemukiman dan bantuan sosial. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dengan membantu pemerintah dan masyarakat dalam pemulihan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Kesimpulan

Bencana banjir sering terjadi di wilayah DKI Jakarta/Jakarta Utara adalah banjir di musim hujan dan banjir kiriman dari daerah Bogor akibat meluapnya 13 aliran sungai dari sungai Ciliwung. Dampak dari peristiwa-peristiwa bencana alam tersebut banyak menimbulkan kerugian fisik dan non fisik, harta dan ben-

da dari masyarakat, serta sarana dan prasarana pemerintah yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah Jakarta dan nasional. Berpengaruh pula pada sektor keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan, kelaparan, pendidikan, perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat, yang muaranya akan dapat melemahkan ketahanan dan pertahanan masyarakat.

Komponen utama dalam penanggulangan bencana adalah peran dari organisasi BNPB dan BNPB Pemprov Pemkot Jakut yang didalamnya melibatkan Satgas PRC PB dari Kowil/Kodim 0502 /JU. Dari hasil evaluasi beberapa kejadian bencana alam dan pelaksanaan penanggulangannya di wilayah, dirasakan belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah dan komponen lainnya. Hasil studi yang dilaksanakan di Kodim 0502/JU, membuktikan bahwa penyebab belum optimalnya Kowil dalam penanggulangan bencana di darat adalah karena organisasi Satgas Kowil, yang didalamnya ada Satgas PRC PB belum tertata tugas dan tataran kewenangannya, organisasi di BPBD belum solid, bergerak sendiri sendiri sesuai program masing-masing, sehingga korban dan dampak bencana menjadi semakin bertambah dan memberikan beban

pada masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kodim 0502/JU sebagai bagian dari Komponen Utama Pertahanan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang utama untuk melakukan penanggulangan bencana, evakuasi dan bantuan kemanusiaan, karena merupakan tugas pokoknya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka diperlukan peran, tataran kewenangan dan mekanisme dalam organisasi yang terstruktur. Organisasi yang terstruktur mulai dari Satgaslinmas yang ada di desa, PRC PB tingkat Kodim sampai dengan Satgas PRC PB tingkat pusat di TNI AD/TNI, dalam organisasi BNPB pusat dan organisasi BPBD Pemprov DKI Jaya dan Pemkot Jakarta Utara.

Pemerintah pusat, daerah dan Satuan TNI jajaran Garnisun Ibukota Jakarta, yang tergabung dalam BNPB dan BPBD perlu tanggap dengan cepat menyikapi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, dengan melakukan tindakan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, sehingga situasi dan kondisi daerah Jakarta segera dapat kondusif kondisinya. Kondisi kesiapan Satgas Kowil dan Satgas PRC PB saat ini cukup berperan, tetapi hasil yang dicapai kurang

optimal, hal tersebut terjadi tentunya akibat dari kendala yang ada di dalam maupun diluar satuan, seperti keterbatasan kemampuan, kekuatan dan gelar Satgas Kowil di wilayah DKI Jakarta, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang didalamnya penak operasi. Untuk dapat berperan dengan baik membantu Pemprov DKI Jaya/ Pemkot Jakut dalam memberdayakan masyarakat di darat, maka diperlukan peran para pimpinan, prajurit untuk mengoptimalkan tugas satuan Kowil dalam melaksanakan penanggulangan bencana mulai tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam kondisi status tanggap darurat bencana alam maka diperlukan kecepatan, ketanggapsegeraan semua jajaran Kowil yang daerahnya tertimpa bencana.

Dalam penugasan sering terjadi keterlambatan, kondisi tersebut banyak diakibatkan oleh keterbatasan sarana angkutan, dan pada sisi lain akibat dari lemahnya Kodal yang ada di BPBD, karena masih bergerak sektoral pada fungsinya masing-masing. Kendala-kendala tersebut menjadi saran masukan kepada pengambil kebijakan di tingkat atas, sehingga peran Kowil dan Satgas PRC PB yang merupakan bagian dari organisasi BPBD dapat melaksanakan tugas dan tang-

gung jawabnya dengan baik dan benar. Kodim 0502 /JU saat ini kurang optimal dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Jakarta Utara, karena beberapa kendala teknis, keterbatasan kuantitas personil, sarana pendukung yang terjadi dalam organisasi BPBD dan Satgas PRC PB. Pada program kedepan menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Komponen Pertahanan dan Keamanan, untuk tugas mengatasi ancaman nir militer, di dalamnya bencana alam menjadi ancaman yang faktual di wilayah Indonesia, khususnya bencana banjir di wilayah Jakarta. Ancaman militer, apalagi militer asing, kecil kemungkinannya dalam beberapa tahun kedepan, sehingga pengerahan Alat utama sistem senjata (Alutsista), Pustur TNI/TNI AD difokuskan pada ancaman nir militer..

DAFTAR PUS TAKA

- Budiman, Subandono Diposaptono, 2007, *Mengantisipasi Bencana*, diterbitkan oleh PT Sarana Komunikasi Utama PO Box 167/BOO Bogor, Agustus 2007.
- , 2008, *Hidup dan Akrab dengan Gempa dan Tsunami*, diterbitkan oleh PT Sarana Komunikasi Utama PO Box 167/BOO Bogor, Januari 2008.
- Dephan 2007, *Postur Pertahanan Negara Republik Indonesia*, Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor ; KEP / 70 / M / XII / 2007. Jakarta, Tanggal, 28 Desember 2007.
- Dephan 2007, *Buku Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia*, Nomer ; Per / 23 / M / XII / 2007. Tanggal, 28 Desember 2007.
- Dephan 2007, *Buku Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia*, Nomer ; Per / 23 / M / XII / 2007. Tanggal, 28 Desember 2007.
- Dephan 2007, *Buku Strategi Pertahanan Negara*, diterbitkan oleh Dephan RI di Jakarta pada Tanggal, 28 Desember 2007.
- Djalal, Dino Pati, 2007, *Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY*, diterbitkan oleh Red & White Publishing, Jakarta, 16 Desember 2007
- Febian Tessa, 2007, *Bencana Alam di Indonesia, Banjir dan Tanah Longsor*, diterbitkan oleh PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2005.
- Kodiklat TNI AD 2003, *Kodam sebagai Kompartemen Strategis Pertahanan* (Sistem Pertahanan Semesta), Bandung, Tanggal, 5 Oktober 2003. Lemhannas 2005,

- Buku Pendidikan Kewarganegaraan*, Tahun 2005 dikeluarkan oleh Lemhannas RI, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta, September 2005.
- Mabesad 2000, *Bujuknik tentang Bantuan Penanggulangan Masalah Pertahanan tingkat Kodim*, Nomer: 17-N-55, Skep Kasad No. Skep/175/IV/2000, Jakarta, 14 April 2000.
- 2005, *Bujuknik tentang Latihan Satuan Komando Kewilayahan*, No.201.05-111116, PT Ter-10. Skep Kasad Nomer Skep/105/V/2005, Jakarta, 3 Mei 2005.
- 2007, *Bujuklak tentang Manajemen Operasi*, Nomer: PP Inf- 11, Peraturan Kasad Nomer: Perkasad /1 18/IX/2007, Jakarta, 10 September 2007.
- 2006, *Bujuknik tentang Penyiapan Satuan Komando Kewilayahan*, N. 203.0207, PT : OPS-03, Skep Kasad Nomer Skep/29/II/2006, Jakarta, 7 Pebruari 2006.
- 2001, *Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*, Skep Kasad Nomor : Kep/18/XII/ 2001 Tanggal. 15 Desember 2001.
- 2006, *Setia dan Menepati Janji serta Sumpah Prajurit (Mewujudkan TNI AD Solid - Profesional-Tanggung Berwawasan Kebangsaan dan Dicitai Rakyat)*, keluaran Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Mei 2006.
- 2000, *Buletin Teritorial*, dikeluarkan oleh Markas Besar Angkatan Darat, Stap Umum Teritorial, Jakarta, 31 Desember 2007.
- Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta , April 2008.
- Pantev Plamen, 2005, *Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan*, Penerbit Pro Com Ltd, Sovia Bulgaria, Januari 2005.
- Purwadi, Mayjen Pur 2001, *Teknologi yang dibutuhkan dan dikuasai dalam rangka mengembtan tugas TNI 5-10 tahun mendatang*. Editor Dr. Indria Samego, The Habibie Center, Jakarta 2001.
- Puspito Nanang T, 2006, *Potensi Gempa dan Tsunami di Indonesia*, Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral-ITB, Jakarta, 4 April 2006.
- Pusat Teritorial TNI AD 2003, *Buku Petunjuk Pembinaan tentang Binter*, PB : TER-01, Skep Danpuster TNI AD Nomer Skep/175/IV/2000, Jakarta, 14 April 2000.
- Rachmawati, Ike Kusdyah, Hj, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV Andi Offset, Yogyakarta, September 2007.

- Roestiyah, 2008, *Strategi Belajar Mengajar*, penerbit Rineka Cipta, dicetak oleh Asdi Mahasatya, Jakarta Februari 2008.
- Rahim, Supli Effendi, 2006, *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta, September 2006.
- Sadyohutomo, Mulyono, Ir, 2000, *Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan*, diterbitkan oleh PT Bumi Aksara, Jakarta Maret 2008.
- Samego, Indria 2001, *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, penerbit The Habibie Center, Jakarta , 2001.
- Sastra, I Putu , 2008, "Meboya" *Masyarakat Buleleng Bali dan Pengaruhnya terhadap Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional*, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, Nopember 2008.
- Sesko TNI 2006, *Konsepsi Peman-tapan Komando Kewilayahan TNI dalam rangka Melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang*, Bandung, 12 September 2006.
- Susanto, A B, 2006, *Sebuah Pendekatan Strategic Management, Disaster Management, di Negeri Rawan Bencana*, diterbitkan bersama oleh The Jakarta Consulting Group & Eka Tjipta Foundation, percetakan : PT Angkasa Grafi-ka Pratama, Jakarta, Agustus 2006.
- Sutarto, Endriartono, 2005, *Ke-wajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, PT Jekamas, Jakarta, Oktober 2005.
- Suradinata, Ermaya 2005, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Ketuhanan NKRI*, diterbitkan oleh Suara Bebas di Jakarta, Oktober 2005.
- Shabab Alwi (2009), *Batavia Kota Banjir*, Penerbit Republika, Jakarta, Februari 2009.
- Siswoko, 2005, *Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya*, Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Alam, Jakarta, Februari 2005.
- Surono, 2006, *Strategi Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Indonesia*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi, Bandung, 4 April 2006. Suryohadiprojo, Sayidiman, 2008, *Pengantar Ilmu Perang*, diterbitkan oleh PT Pustaka Intermedia, Jakarta, Desember 2008.
- Sutiyoso, Letjen Pur, 2001, *Pengembangan sistem pertahanan keamanan negara secara kontekstual dan sesuai dengan pengembangan otonomi daerah*, Penerbit The Habibie Center, Jakarta 2001.
- Wibisono, Ali A 2008, *Satu Dekade Reformasi Militer Indone-*

sia, diterbitkan oleh CV Dunia Printing Selaras, Jakarta, Nopember 2008.

Winarno, Budi, 2008, *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*, penerbit PT Tiara Wacana, Sleman Yogyakarta, Nopember 2008.

Winarno, Budi, 2007, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, PT Buku Kita, Jakarta, 2008.

Zaenuddin, HM 2007, *Memahami Masalah-masalah Jakarta Kontemporer yang Dihadapi Warga Ibukota Jakarta*, Jakarta, Juli 2007.

Undang-Undang dan Peraturan

Kodiklat TNI AD 2008, *Kurikulum Pendidikan Kursus Strategi Perang Semesta (Kurdik KSPS Nomer Kode 52-C-1-KSPS-2008)*, disyahkan dengan Peraturan Kasad, Nomer ;Perkasad/11/III/2008, Bandung, Tanggal, 25 Maret 2008.

Depdagri 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomer 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah*, diterbitkan di Jakarta, Tanggal, 11 Mei 2006.

———. 2007, *Undang-undang Republik Indonesia, Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

———. 2008, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomer*

21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

———. 2008, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomer 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana*.

———. 2008, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomer 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana*.

———. 2008, *Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomer 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*.

———. 2008. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomer. 7 Tahun 2008, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara*, Jakarta, Tanggal 26 Januari 2008.

———. 1954. *Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 1954. tentang Dewan Keamanan Nasional*. Jakarta, tanggal 27 Pebruari 1954.

———. 2002. *Undang-undang Republik Indonesia, Nomer. 3 Tahun 2002 Tanggal, 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara*, diterbitkan oleh percetakan Fokusmedia di Bandung pada Nopember 2004.

———. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia, Nomer. 34*

tahun 2004 tanggal, 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, diterbitkan oleh percetakan Fokusmedia di Bandung, Nopember 2004.

———. 2002. *Undang-undang Republik Indonesia, Nomer. 2 tahun 2002 tanggal, 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diterbitkan oleh PT. Visimedia di Jakarta, Maret 2007.*

———. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia, Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta, 26 April 2007.*

———. 2002. *Kep Gubernur Prov Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 96 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satkorlak Bencana dan Penanggulangan Pengungsi Prov Rahsus Ibukota Jakarta, Jakarta, 24 Juli 2002.*

———. 2002. *Kep Gubernur Prov Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 1230 Tahun 2002, tentang Protap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Rahsus Ibukota Jakarta. Jakarta, 24 Juli 2002.*